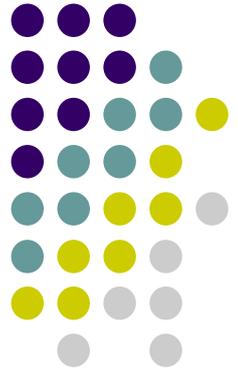


**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PALU**



**Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Tahun 2022**

Tahun Anggaran 2023



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah berkenan melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Palu dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kota Palu Tahun 2022 merupakan wujud pertanggung jawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Rencana Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) pada Tahun 2022. Laporan Akuntabilitas Bappeda Kota Palu Tahun 2022 ini merupakan laporan kinerja tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda 2021-2026. Penyusunan ini, mengacu pada Perpres Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang intinya menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah mulai pejabat eselon IV keatas diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) yang telah disepakatinya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Palu yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Palu, memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta pengukuran pelaksanaan program dan kegiatan yang secara maksimum menggambarkan kinerja outcomenya dan diharapkan akan meningkat pada tahun berikutnya.



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU (LAKIP BAPPEDA 2022)

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja Bappeda sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

Palu, Februari 2023

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Palu



Drs. ARFAN, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19720414 199203 1 004



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu selama Tahun 2022. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Bappeda Kota Palu Tahun 2022 dengan sasaran strategis Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi disajikan pada tabel di bawah ini :

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU (LAKIP BAPPEDA 2022)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	Target Renstra	Realisasi	Capaian
1	2	3				
1	Meningkatkan Reformasi Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP Bappeda Kota Palu	Penilaian Inspektorat Kota Palu	BB		
2	Meningkatkan keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	Jumlah program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD / Jumlah program pada RPJMD x 100%	100%	90,57	90,57
			Jumlah indikator program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD / jumlah indikator program pada RPJMD x 100%			
			Jumlah target program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD / Jumlah target program pada RPJMD x 100%			
		Tingkat keselarasan RKPD terhadap PPAS	Jumlah program yang ada di PPAS yang sesuai dengan RKPD / jumlah program pada RKPD x 100%	100%	90,57	90,57
			Jumlah indikator program pada PPAS yang sesuai dengan RKPD / Jumlah indikator program pada RKPD x 100%			
			Jumlah target program pada PPAS yang sesuai dengan RKPD / Jumlah target program pada RKPD x 100%			

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil analisis pencapaian kinerja Bappeda Kota Palu Tahun 2022 terhadap indikator kinerja utama yaitu 1. Meningkatkan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah menunjukkan capaian kinerja sebesar 90,57% atau dengan kinerja berhasil.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan IKU.....	
1.3 Tugas dan Fungsi Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu	3
1.4 Permasalahan Utama dan Isu Strategis	4
1.5 Landasan Hukum.....	5
1.6 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
2.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)	9
2.2 Perjanjian Kinerja	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1 Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu	15
3.1.1 Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022	15
3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022	21
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Renstra 2021-2026	22
3.1.4 Faktor Penyebab yang Mempengaruhi Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja serta Solusinya	23
3.1.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	23



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU (LAKIP BAPPEDA 2022)

3.1.6 Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2022	26
3.2 Realisasi Anggaran	27
3.2.1 Belanja Langsung	
3.2.2 Belanja Tidak Langsung	
 BAB IV PENUTUP	 29
LAMPIRAN	
- Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2022	
- Hasil Evaluasi Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2022	
- Indikator Kinerja Utama (IKU)	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Palu	11
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	12
Tabel 3.1	Realisasi IKU Tahun 2022	15
Tabel 3.2	Capaian Sasaran Strategis Tahun 2022	17
Tabel 3.3	Capaian Sasaran Strategis Terpenuhinya Aspirasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	18
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2022	21
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra 2021-2026	22
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2022 dengan Realisasi Capain Target Kinerja Tahun 2022	24
Tabel 3.7	Realisasi dan Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021	25
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2022	27
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2022	28



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Dari 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya dan pada Permen PAN & RB

Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revisi laporan kinerja instansi pemerintah.

Atas dasar hal tersebut di atas, untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan di bidang perencanaan pembangunan, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan dokumen berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

1.2 Maksud dan Tujuan Penetapan IKU

Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu disusun dengan maksud dan tujuan, antara lain :

1. Menjadi pedoman bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang bersumber dari dana APBD;
2. Memudahkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;



3. Untuk mengukur kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kedudukannya sebagai unsur perencana pembangunan;
4. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
5. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.4 Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan pembangunan yang menjadi kewenangan daerah kota.

2. Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi, meliputi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi perencanaan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan



- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Permasalahan Utama dan Isu Strategis

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Bappeda yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kota Palu dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah belum maksimal
 - Belum optimalnya proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
 - Belum tersedianya pejabat fungsional perencana dan pengolah data dan informasi;
 - Pemahaman aparatur tentang perencanaan pembangunan daerah belum merata;
 - Terjadinya perubahan regulasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
 - Masih terdapat inkonsisten pelaksanaan perencanaan pembangunan dengan perencanaan pembangunan;
 - Hasil evaluasi dan pengendalian belum secara maksimal di gunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah
 - Belum optimalnya pelaksanaan dan pemanfaatan data dan informasi
 - Pengelolaan data ditangani masing-masing OPD dan belum terintegrasi berbasis teknologi informasi, dan terstandarisasi;
 - Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan data dan informasi dalam mendukung tugas sebagai unsur penunjang perencanaan daerah.

Berdasarkan permasalahan tersebut dengan menggunakan teknik analisis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga perencanaan pembangunan maka disusunlah isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan, sebagai berikut :

1. Konsistensi perencanaan pembangunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan;
2. Ketersediaan sumber daya pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan yang proporsional sesuai kebutuhan;
3. Peningkatan serta pemanfaatan data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan yang belum secara optimal bisa terpenuhi;
4. Pemenuhan kebutuhan SDM maupun sarana penunjang;
5. Hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya di gunakan sebagai dasar perencanaan, dan penganggaran;

1.5 Landasan Hukum

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu Tahun 2022 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
7. Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi no 20 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelayanan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan;
8. Peraturan Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi No 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah



9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palu Tahun 2005– 2025;
10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10); dan
12. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8).
13. Permenpan no 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

1.6 Sistematika Penulisan

Lakip Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu Tahun 2022 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi, Permasalahan utama dan isu strategis, landasan hukum, serta sistematika penulisan.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan Tujuan dan Sasaran, IKU dan Program kegiatan yang tercantum dalam perjanjian kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini, Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dan tahun sebelumnya, realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah, realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, Analisis efisiensi penggunaan sumber daya analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian serta kesimpulan serta langkah langkah akan di ambil di tahun mendatang.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan Penutup dan Simpulan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu

Adapun tujuan utama dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu adalah mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Palu Tahun 2021 - 2026.

RPJMD 2021 - 2026 Untuk mencapai tujuan utama tersebut dijabarkan dalam beberapa tujuan dan sasaran sebagai berikut.

Tujuan :

- Meningkatnya Reformasi Birokrasi yang bersih dan akuntabel
- Meningkatnya Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan daerah

Sasaran :

- Meningkatkan Reformasi Birokrasi yang bersih dan akuntabel
- Meningkatkan keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan daerah

Indikator Tujuan/Sasaran :

- Nilai Reformasi Birokrasi Bappeda Kota Palu
- Nilai SAKIP Bappeda Kota Palu

Indikator Tujuan/Sasaran :

- Tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah
- Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD
- Tingkat keselarasan RKPD terhadap PPAS

2.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Bappeda Kota Palu serta RPJMD Kota Palu tahun 2021-2026. Adapun Indikator kinerja utama Bappeda Kota Palu ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Palu
RPJMD 2021 – 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA
1	2	3	
1	Meningkatkan Reformasi Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP Bappeda Kota Palu	Penilaian Inspektorat Kota Palu
2	Meningkatkan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan RKPd terhadap RPJMD	Jumlah program pada RKPd yang sesuai dengan RPJMD / Jumlah program pada RPJMD x 100%
			Jumlah indikator program pada RKPd yang sesuai dengan RPJMD / jumlah indikator program pada RPJMD x 100%
			Jumlah target program pada RKPd yang sesuai dengan RPJMD / Jumlah target program pada RPJMD x 100%
		Tingkat keselarasan RKPd terhadap PPAS	Jumlah program yang ada di PPAS yang sesuai dengan RKPd / jumlah program pada RKPd x 100%
			Jumlah indikator program pada PPAS yang sesuai dengan RKPd / Jumlah indikator program pada RKPd x 100%
			Jumlah target program pada PPAS yang sesuai dengan RKPd / Jumlah target program pada RKPd x 100%

2.3 Perjanjian Kinerja



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU (LAKIP BAPPEDA 2022)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu telah membuat perjanjian kinerja tahun 2022 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah indikator kinerja utama tingkat Perangkat Daerah Kota Palu yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra Bappeda Kota Palu Tahun 2021-2026.

Perjanjian Kinerja tingkat Bappeda Kota Palu Tahun 2022 yang telah ditandatangani adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2022
RPJMD 2021 - 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA
1	2	3	
1	Meningkatkan Reformasi Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP Bappeda Kota Palu	Penilaian Inspektorat Kota Palu
2	Meningkatkan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	Jumlah program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD / Jumlah program pada RPJMD x 100%
			Jumlah indikator program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD / jumlah indikator program pada RPJMD x 100%
			Jumlah target program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD / Jumlah target program pada RPJMD x 100%
		Tingkat keselarasan RKPD terhadap PPAS	Jumlah program yang ada di PPAS yang sesuai dengan RKPD / jumlah program pada RKPD x 100%
			Jumlah indikator program pada PPAS yang sesuai dengan RKPD / Jumlah indikator program pada RKPD x 100%
			Jumlah target program pada PPAS yang sesuai dengan RKPD / Jumlah target program pada RKPD x 100%



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU (LAKIP BAPPEDA 2022)

Dalam perjanjian kinerja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu pada Tahun 2022, telah menyesuaikan dengan Program dan Kegiatan yang ada dalam Renstra Bappeda :

1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

*** Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**

- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA – SKPD
- Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-P SKPD
- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
- **Administrasi keuangan perangkat daerah**
- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD
- **Administrasi umum perangkat daerah**
- Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
- Penyediaan bahan logistic kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
- Fasilitasi kunjungan tamu
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- **Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**
- Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air/listrik
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- **Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU (LAKIP BAPPEDA 2022)

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya

1.2 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

* **Penyusunan, perencanaan dan pendanaan**

- Analisis kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah
- Koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya
- Pelaksanaan konsultasi public
- Koordinasi pelaksanaan forum SKPD/ Lintas SKPD
- Pelaksanaan Musrenbang kabupaten/kota
- Penyiapan bahan koordinasi musrenbang kecamatan
- Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota

* **Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah**

- Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
- Pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
- Penyusunan profil pembangunan daerah kabupaten kota

* **Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota**



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU (LAKIP BAPPEDA 2022)

- Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di kabupaten kota
- Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu.

Capaian kinerja realisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perbandingannya.

3.1.1 Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 di gambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Realisasi IKU Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	FORMULA
			4	5	
1	2	3	4	5	
1	Meningkatkan Reformasi Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP Bappeda Kota Palu	BB		Hasil Penilaian Inspektorat Kota Palu
2	Meningkatkan keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	100%	90,57	Jumlah program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD / Jumlah program pada RPJMD x 100%
					Jumlah indikator program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD / jumlah indikator program pada RPJMD x 100%
					Jumlah target program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD / Jumlah target program pada RPJMD x 100%
		Tingkat keselarasan RKPD terhadap PPAS	100%	90,57	Jumlah program yang ada di PPAS yang sesuai dengan RKPD / jumlah program pada RKPD x 100%
					Jumlah indikator program pada PPAS yang sesuai dengan RKPD / Jumlah indikator program pada RKPD x 100%
					Jumlah target program pada PPAS yang sesuai dengan RKPD / Jumlah target program pada RKPD x 100%

A. Capaian Sasaran Strategis



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU (LAKIP BAPPEDA 2022)

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis. Perumusan Indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja makro serta indikator kinerja strategis.

Adapun predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

No	Skalanilai (%)	Kesimpulan evaluasi
1	85–100	SangatBerhasil
2	70–84,99	Berhasil
3	55–69,99	CukupBerhasil
4	<54,99	TidakBerhasil

Secara rinci capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Sasaran Strategis Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Interval (%)			
					<54,99	55-69,99	70-84,99	85-100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Reformasi Birokrasi yang bersih dan akuntabel.	Nilai SAKIP Bappeda Kota Palu.	BB						√
Meningkatkan keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD/Tingkat keselarasan RKPD terhadap PPAS	100%	90,57	90,57				√

Evaluasi Capaian Sasaran Strategis

Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2022 untuk sasaran strategis **“Meningkatkan keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan daerah”** dengan indikator kinerja utama yaitu Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD/Tingkat keselarasan RKPD terhadap PPAS, angka capaian kinerja sasarannya sebesar 90.62% dengan predikat **Sangat Berhasil**. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	Target Renstra	Realisasi	Capaian
1	2	3				
1	Meningkatkan Reformasi Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP Bappeda Kota Palu	Penilaian Inspektorat Kota Palu	BB		
2	Meningkatkan keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan RKPd terhadap RPJMD	Jumlah program pada RKPd yang sesuai dengan RPJMD / Jumlah program pada RPJMD x 100%	100%	90.57	90,57
			Jumlah indikator program pada RKPd yang sesuai dengan RPJMD / jumlah indikator program pada RPJMD x 100%			
			Jumlah target program pada RKPd yang sesuai dengan RPJMD / Jumlah target program pada RPJMD x 100%			
		Tingkat keselarasan RKPd terhadap PPAS	Jumlah program yang ada di PPAS yang sesuai dengan RKPd / jumlah program pada RKPd x 100%	100%	90.57	90,57
			Jumlah indikator program pada PPAS yang sesuai dengan RKPd / Jumlah indikator program pada RKPd x 100%			
			Jumlah target program pada PPAS yang sesuai dengan RKPd / Jumlah target program pada RKPd x 100%			

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap konsistensi program adalah sebagaiberikut :

- $K1 = \frac{185}{228} \times 100\% = 81,15 \%$
 - Program RKPd yang sesuai dengan program pada RPJMD sebanyak 185 dari total program RPJMD sebanyak 228 program atau sebesar 81,14 %
- $K2 = \frac{185}{228} \times 100\% = 81,14\%$
 - Indikator program pada RKPd yang sesuai dengan RPJMD sebanyak 185 indikator, dari total 228 indikator yang terdapat pada RPJMD sehingga tingkat kesesuaiannya mencapai 81,14%,
- $K3 = \frac{185}{228} \times 100\% = 81,14\%$



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU (LAKIP BAPPEDA 2022)

- jumlah target pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD sebanyak 184 target, dari total 228 target yang terdapat pada RPJMD sehingga tingkat kesesuaiannya mencapai 81,14%,
- $K4 = \frac{185}{185} \times 100\% = 100\%$
 - Program PPAS yang sesuai dengan program RKPD sebanyak 185 program, total program pada RKPD sebanyak 185 program atau sebesar 100%.
 - Indikator dan target pada PPAS yang sesuai 185 dengan RKPD sebanyak 185 indikator , total indikator target RKPD sebanyak 185 atau sebesar 100%.
- $K5 = \frac{185}{185} \times 100\% = 100\%$
- $K6 = \frac{185}{185} \times 100\% = 100\%$
 - Tingkat keselarasan dokumen RKPD terhadap RPJMD/Tingkat keselarasan dokumen RKPD terhadap PPAS sebesar 90,57 %.
- Total : (K1+K2+K3) + (K4+K5+K6) /6
 - (81,14+81,14+81,14) + (100,54+100,54+100,54)/6
 - 90,57%

Untuk Indikator Nilai SAKIP Bappeda Kota Palu Tahun Anggaran 2022 menunggu hasil penilaian dari Inspektorat Kota Palu, Untuk Tahun Anggaran 2021 Bappeda Kota Palu mendapatkan nilai BB, sedangkan Pemerintah Kota Palu Kota Palu Mendapatkan Nilai B, berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran di bandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil di pemerintah kota palu sudah baik, namun masih memerlukan perbaikan dan menindaklanjuti hasil rekomendasi baik



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU (LAKIP BAPPEDA 2022)

dari Inspektorat maupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia , antara lain :

- Rekomendasi Inspektorat Kota Palu
 - Memanfaatkan sepenuhnya IKU dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, menjadikan IKU sebagai dasar pemberian reward atau punishment kepada setingkat eselon IV ke atas berdasarkan hasil pengukuran kinerja;
 - Melakukan pengukuran kinerja sampai ke individu staf;
 - Mendokumentasikan dengan baik kegiatan monitoring dan evaluasi kemajuan capaian kinerjaatas program kegiatan, rencana aksi, kegiatan kegiatan utama beserta hambatan
 - Memberikan alternatif perbaikan dalam pemantauan rencana aksi dalam upaya peningkatan kualitas evaluasi;
 - Menindaklanjuti hasil evaluasi program untuk perbaikan di masa akan datang.
- Rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
 - Mendorong komitmen pimpinan OPD dalam perbaikan kualitas manajemen kinerja melalui pelaksanaan dialog kinerja terkait penetapan strategi dan target kinerja;
 - Menyusun dokumen perencanaan lainnya berdasarkan RPJMD Kota Palu tahun 2021-2026 sehingga terciptanya keselarasan antar level organisasi dalam mewujudkan performance based organitation;
 - Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dengan menetapkan kinerja yang berorientasi hasil, dan menuangkan dalam dokumen perencanaan yang bersifat formal, RPJMD, Renstra OPD, Perjanjian kinerja dan Indikator Kinerja Utama, serta menggunakan indicator kinerja yang memenuhi kriteria terukur;
 - Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan menyajikan analisis

pencapaian kinerja dengan informasi yang memadai, sehingga laporan kinerja yang di buat dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya;

- Membanguna strategi dan kaleborasi dengan seluruh OPD dan mitra kerja strategis dalam meningkatkan capaian kinerja dan prioritas daerah dengan mengidentifikasi crosscutting program kegiatan OPD.

Hasil rekomendasi Inspektorat dan Kementerian pendayagunaan aparatur dan Reformasi Birokrasi ini sesuai dan selaras dengan tujuan dan keinginan pemerintah Kota Palu

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021		Tahun 2022	
		Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Reformasi Birokrasi yang bersih dan akuntabel.	Nilai SAKIP Bappeda Kota Palu..	BB	BB	BB	
Meningkatkan keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD/Tingkat keselarasan RKPD terhadap PPAS	100%	94,78	100%	90,57

Bersarkan Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022 dapat diketahui indikator kinerja utama

Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD / Tingkat keselarasan RKPD terhadap PPAS pada Tahun 2022 realisasi 90,57% dan capaian 90,57%, dibandingkan pada tahun 2021 dengan realisasi 94,78% dan capaian 94,78%. Sedangkan Indikator Nilai SAKIP Bappeda Kota Palu 2021 mendapatkan Nilai BB dan 2022 menunggu hasil dari Inspektorat Daerah Kota Palu.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Renstra 2021-2026

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra 2021-2026

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	Target Renstra	Realisasi	Capaian
1	2				
1	Nilai SAKIP Bappeda Kota Palu	Penilaian Inspektorat Kota Palu	BB		
2	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	Jumlah program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD / Jumlah program pada RPJMD x 100%	100%	90,57	90,57
		Jumlah indikator program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD / jumlah indikator program pada RPJMD x 100%			
		Jumlah target program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD / Jumlah target program pada RPJMD x 100%			
2	Tingkat keselarasan RKPD terhadap PPAS	Jumlah program yang ada di PPAS yang sesuai dengan RKPD / jumlah program pada RKPD x 100%	100%	90,57	90,57
		Jumlah indikator program pada PPAS yang sesuai dengan RKPD / Jumlah indikator program pada RKPD x 100%			
		Jumlah target program pada PPAS yang sesuai dengan RKPD / Jumlah target program pada RKPD x 100%			

Bersarkan Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra 2021-2026 dapat diketahui indikator kinerja utama Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD/Tingkat keselarasan RKPD terhadap PPAS pada Tahun 2022 realisasi 90,57% dan capaian 90,57%, sedangkan Indikator



Nilai Sakip Bappeda Kota Palu menunggu hasil penilaian Inspektorat Daerah Kota Palu.

3.1.4 Faktor Penyebab yang Mempengaruhi Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja serta Solusinya

Tidak tercapainya indikator kinerja utama Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD/Tingkat keselarasan RKPD terhadap PPAS disebabkan antara lain :

- a. Terjadinya perubahan regulasi dan peraturan perundang – undangan terkait Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- b. Belum optimalnya koordinasi perencanaan, dan penganggaran pembangunan daerah
- c. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program perangkat daerah
- d. Belum optimalnya penyiapan data dan informasi pembangunan daerah kota palu sehingga perlu untuk mengantisipasi hal hal tersebut, maka di perlukan :
 - Menerapkan sistim perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah berbasis IT;
 - Memperbaiki dan meningkatkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara konsisten untuk menjamin pencapaian kinerja perangkat daerah; dan
 - Menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Kota Palu yang akurat dan valid sebagai dasar penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

3.1.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Aspek efesiensi penggunaan sumber daya yang di maksudkan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara capain target kinerja

tahun 2022 dengan realisasi anggaran tahun 2022. Sejauh mana realisasi penggunaan anggaran yang digunakan dalam upaya mencapai target kinerja yang di inginkan tahun 2022. Secara garis besar bahwa capaian target kinerja tahun 2022 dengan capain sebesar 90,57%, realisasi anggaran tahun 2022 untuk pencapaian target sebesar 3.222.370.875,- atau (92,27%) dari target belanja langsung Bappeda Kota Palu sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2022 yang menunjang pencapaian kinerja sejumlah Rp. 3.492.256.510,-, atau terdapat efisiensi penggunaan anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 269.885.635,- .

Rincian realisasi penggunaan anggaran tahun 2022 dengan realisasi capaian target kinerja tahun 2020 pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2022 dengan Realisasi Capaian Target Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan Reformasi Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP Bappeda Kota Palu	BB			50.035.350	33.035.350	66,02
Meningkatkan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	100%	90,57%	90,57%	3.442.221.160	3.189.335..525	92,65%
	Tingkat keselarasan RKPD terhadap PPAS						

3.1.6 Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2022
Tabel 3.7
Realisasi dan Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
		Uraian	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		Koordinasi dan penyusunan RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Koordinasi dan penyusunan RKA-P SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%
Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan, Perencanaan dan Pendanaan	Analisis kondisi daerah permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	4 Kali	4 Kali	100%
		Pelaksanaan konsultasi publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Kali	1 Kali	100%
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Kali	2 Kali	100%
Koordinasi pelaksanaan forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah					

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU (LAKIP BAPPEDA 2022)

		Pelaksanaan musrenbang kabupaten kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	3 kali	3 kali	100%
		Penyiapan bahan koordinasi musrenbang kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	100 Usulan	100 Usulan	100%
		Pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	41 Orang	41 Orang	100%
		Penyusunan profil pembangunan daerah kabupaten kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1 Buku	100%
	Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi pengendalian, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kabupaten kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	4 Laporan	100%
		Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Cakupan data dan informasi yang di gunakan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan	4 Laporan	4 Laporan	100%

3.2 Realisasi Anggaran

Belanja operasional merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program, yang mana dana tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan. Bappeda Kota Palu Tahun 2022 menganggarkan belanja langsung sebesar Rp. 9.144.157.755,- dengan realisasi anggaran



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU (LAKIP BAPPEDA 2022)

sebesar Rp. 8.528.162.042,- atau 93,26% yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Tahun 2022

No	Nama Sub Kegiatan	PAGU	Nilai Realisasi LRA	Sisa Anggaran
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.990.400	14.400.400	4.590.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.626.000	5.676.000	5.950.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.626.000	5.676.000	5.950.000
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.792.950	7.282.950	510.000
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.796.283.302	3.601.891.099	194.392.203
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	31.719.875	31.066.375	653.500
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.722.700	2.722.700	-
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.307.408	66.802.700	3.504.708
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	88.957.810	86.397.793	2.560.017
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.346.450	20.326.950	19.500
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.200.000	12.400.000	2.800.000
12	Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.600.000	21.600.000	-
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	504.312.000	496.352.326	7.959.674
14	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.000.000	22.000.000	-
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.910.000	3.232.184	5.677.816
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	695.265.100	635.503.040	59.762.060
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	321.776.600	272.796.000	48.980.600
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.500.000	23.800.000	16.700.000



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU (LAKIP BAPPEDA 2022)

19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.000.000	8.900.000	3.100.000
20	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	80.250.000	68.350.380	11.899.620
21	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	45.262.500	43.085.240	2.177.260
22	Pelaksanaan Konsultasi Publik	48.005.000	48.005.000	-
23	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	57.891.500	57.891.500	-
24	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	285.968.575	283.416.559	2.552.016
25	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	21.429.575	21.429.575	-
26	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	607.600.710	564.936.876	42.663.834
27	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	386.812.000	385.261.268	1.550.732
28	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	532.435.050	444.924.312	87.510.738
29	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	351.739.300	339.651.100	12.088.200
30	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	232.309.575	187.314.566	44.995.009
31	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	101.034.125	88.796.535	12.237.590
32	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	691.483.250	656.272.614	35.210.636
	JUMLAH	9.144.157.755	8.528.162.042	615.995.713

BAB IV

PENUTUP

Hasil analisis pencapaian kinerja Bappeda Kota Palu Tahun 2022 terhadap indikator kinerja utama yaitu Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD / Tingkat keselarasan RKPD terhadap PPAS menunjukkan capaian kinerja sebesar 90,57 % atau dengan kinerja **Sangat Berhasil**.

Atas tercapainya hasil kinerja tahun 2022, Bappeda Kota Palu harus terus meningkatkan dan mempertahankan pencapaian kinerja untuk tahun-tahun akan datang. Hal-hal penting yang harus ditingkatkan dalam masa mendatang agar peningkatan kinerja Bappeda Kota Palu benar menunjukkan indikator kinerja utama Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD / Tingkat keselarasan RKPD terhadap PPAS indikator kinerja utama sebuah lembaga yang sangat strategis adalah sebagai berikut :

1. Membangun *Website Bappeda Kota Palu* sebagai sarana menginformasikan seluruh aktivitas kebabedaan, *Tatopomo (Target aksi obrolan masyarakat)* dan *E-Data Base, Satu Data* dan SIPD guna meningkatkan peran Bappeda Kota Palu dalam mengkoordinasikan dan menyelaraskan penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
2. Konsistensi dalam menjalankan Tujuan / Sasaran yang akan di capai sesuai dengan target yang telah di tentukan dalam RPJMD Pemerintah Kota Palu dan Renstra Bappeda Kota Palu;
3. Memperbaiki pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara konsisten untuk menjamin pencapaian kinerja perangkat daerah; dan
4. Menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Kota Palu yang akurat dan valid.



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU (LAKIP BAPPEDA 2022)

Terima kasih yang tak terhingga kepada semua rekan rekan pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu yang telah mendukung hingga tersedia dan tersusunnya Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kota Palu Tahun Anggaran 2022.

Palu, 10 Februari 2023

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Palu



Drs. ARFAN, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19720414 199203 1 004



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022



Drs. ARFAN. M.Si

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

 **bangga
melayani
bangsa**

VISI

“MEMBANGUN KOTA PALU YANG MANDIRI AMAN DAN NYAMAN, TANGGUH SERTA PROFESIONAL DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN KEAGAMAAN”

MISI

1. Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global;
2. Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana;
- 3, Mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan covid-19; dan
4. Menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani.

ARAH KEBIJAKAN BAPPEDA

1. Menerapkan sistim perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi yang terpadu
2. Peningkatan pemanfaatan hasil perencanaan, pengendalian dan evaluasi
3. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi antar para perencana perangkat Daerah
4. Meningkatkan pemahaman atas tugas dan fungsi perangkat Daerah
5. Pelatihan SDM Perencana
6. peningkatan kualitas data dan informasi
7. Peningkatan perencanaan berbasis data dan informasi
8. Peningkatan hasil Monitoring, pengendalian dan evaluasi
9. Peningkatan Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan daerah yang didukung Pengendalian dan Evaluasi

MISI IV

MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG
PROFESIONAL DAN SELALU HADIR
MELAYANI



TUJUAN BAPPEDA

1. Meningkatnya Reformasi Birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. Meningkatnya Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan daerah



SASARAN BAPPEDA

1. Meningkatkan Reformasi Birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. Meningkatkan keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan daerah



INDIKATOR

- 1.- Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD
- Tingkat keselarasan RKPD terhadap PPAS

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Reformasi Birokrasi yang bersih dan akuntabel		Nilai Reformasi Birokrasi Bappeda Kota Palu	CC	CC	B	B	BB
		Meningkatkan Reformasi Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP Bappeda Kota Palu	BB	BB	BB	A	A
2	Meningkatnya Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan daerah		Tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatkan keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan daerah.	Tingkt keselarasan RKPD terhadap RPJMD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Tingkat keselarasan RKPD terhadap PPAS	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Isu Strategis dan Permasalahan

- ▶ **Belum optimalnya proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.**
 - Belum tersedianya pejabat fungsional perencana dan pengolah data dan informasi;
 - Pemahaman aparatur tentang perencanaan pembangunan daerah belum merata;
 - Terjadinya perubahan regulasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
 - Masih terdapat inkonsisten pelaksanaan perencanaan pembangunan dengan perencanaan pembangunan;
 - Hasil evaluasi dan pengendalian belum secara maksimal di gunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah
- ▶ **Belum optimalnya pelaksanaan dan pemanfaatan data dan informasi**
 - Pengelolaan data ditangani masing-masing OPD dan belum terintegrasi berbasis teknologi informasi, dan terstandarisasi;
 - Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan data dan informasi dalam mendukung tugas sebagai unsur penunjang perencanaan daerah.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA
1	2	3	
1	Meningkatkan Reformasi Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP Bappeda Kota Palu	Penilaian Inspektorat Kota Palu
2	Meningkatkan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	Jumlah program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD / Jumlah program pada RPJMD x 100%
			Jumlah indikator program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD / jumlah indikator program pada RPJMD x 100%
			Jumlah target program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD / Jumlah target program pada RPJMD x 100%
		Tingkat keselarasan RKPD terhadap PPAS	Jumlah program yang ada di PPAS yang sesuai dengan RKPD / jumlah program pada RKPD x 100%
			Jumlah indikator program pada PPAS yang sesuai dengan RKPD / Jumlah indikator program pada RKPD x 100%
			Jumlah target program pada PPAS yang sesuai dengan RKPD / Jumlah target program pada RKPD x 100%

Sumber data
 RPJMD
 RKPD
 PPAS dan Hasil
 Evaluasi Kinerja
 dan Realisasi OPD

INDIKATOR & TARGET KINERJA BAPPEDA



Nilai Sakip Bappeda Kota Palu

BB

Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD
Tingkat keselarasan RKPD terhadap PPAS

100 %

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU
TAHUN 2022

No.	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatkan Reformasi Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP Bappeda Kota Palu	BB
2	Meningkatkan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	100%
		Tingkat keselarasan RKPD terhadap PPAS	100%

Program Anggaran

I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota Rp 5.136.650.053

II Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Rp 3.367.221.735

Palu, 10 Januari 2022
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
H. RADIANTO RASYID, S.E.
NIP.19720114 199203 1 004

APBD 2022

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU
PERUBAHAN TAHUN 2022

No.	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatkan Reformasi Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP Bappeda Kota Palu	BB
2	Meningkatkan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	100%
		Tingkat keselarasan RKPD terhadap PPAS	100%

Program Anggaran

I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota Rp 5.701.936.595

II Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Rp 3.442.221.160

Palu, 6 Oktober 2022
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
H. RADIANTO RASYID, S.E.
NIP.19720114 199203 1 004

APBD-P 2022

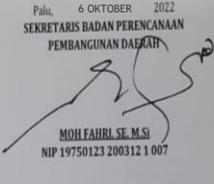
PERJANJIAN KINERJA ESELLON III

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU
PERUBAHAN TAHUN 2022

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Terwujudnya pelayanan dan kelancaran program penunjang urusan pemerintah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah	100%

Program
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota Rp 5.701.936.595

Palu, 6 OKTOBER 2022

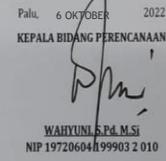

 KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
 Drs. ARBAN, M.Si
NIP. 19720414199203 1 004
 MOH FAHRI, SE, M.Si
NIP. 19750123 200312 1 007

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU
PERUBAHAN TAHUN 2022

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, konsisten, inovatif serta pengendalian pembangunan daerah yang komprehensif	Cakupan dokumen perencanaan Pembangunan daerah	100%

Program
1 Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 Anggaran Rp 1.146.407.860
 Kegiatan
 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Rp 1.146.407.860

Palu, 6 OKTOBER 2022

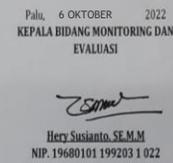

 KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
 Drs. ARBAN, M.Si
NIP. 19720414199203 1 004
 WAHYUNI, S.Pd, M.Si
NIP. 19720604199903 2 010

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU
PERUBAHAN TAHUN 2022

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	Cakupan dokumen evaluasi dan pengendalian dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah	100%

Program
1 Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 Anggaran Rp 1.024.826.950
 Kegiatan
 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah Rp 1.024.826.950

Palu, 6 OKTOBER 2022

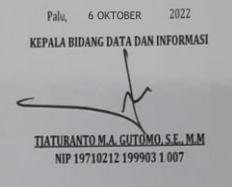

 KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
 Drs. ARBAN, M.Si
NIP. 19720414199203 1 004
 Hery Susianto, SE, M.M
NIP. 19680101 199203 1 022

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU
PERUBAHAN TAHUN 2022

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Tersedianya basis data dan informasi yang valid untuk digunakan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan	Cakupan data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan	100%

Program
1 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 Anggaran Rp 1.270.986.350
 Kegiatan
 Analisis data dan informasi pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan daerah Rp 1.270.986.350

Palu, 6 OKTOBER 2022


 KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
 Drs. ARBAN, M.Si
NIP. 19720414199203 1 004
 TIATURANTO M.A. GUTOMO, SE, M.M
NIP. 19710212 199903 1 007

CASCHADING KINERJA BAPPEDA KOTA PALU

KEPALA
DAERAH



**MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL
DAN SELALU HADIR MELAYANI**

MISI IV

KEPALA
OPD



SASARAN STRATEGIS :

Meningkatkan Reformasi Birokrasi yang bersih dan akuntabel
Meningkatkan keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan daerah.

INDIKATOR KINERJA :

Nilai SAKIP Bappeda Kota Palu
Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD
Tingkat keselarasan RKPD terhadap PPAS

KEPALA
BIDANG



PROGRAM :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

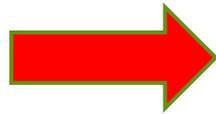
SASARAN PROGRAM :

Tersedianya dokumen perencanaan yang baik dan tepat waktu
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, konsisten, lengkap, dan inovatif serta
pengendalian pembangunan daerah yang komprehensif

INDIKATOR PROGRAM :

Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah
Cakupan dokumen perencanaan pembangunan daerah

KEPALA
SEKSI/SUBA
G



KEGIATAN ;

Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah

SASARAN KEGIATAN ;

Tersedianya dokumen perencanaan OPD
Tersediannya dokumen perencanaan pemerintah daerah

INDIKATOR KINERJA ;

Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah
Cakupan dokumen perencanaan Pembangunan daerah

REKOMENDASI ATAS HASIL EVALUASI LAKIP BAPPEDA 2021 OLEH INSPEKTORAT KO TA PALU:

- 1. Pemberian Reward atau Punishment kepada pegawai atas hasil capaian kinerja**
- 2. Pendokumentasian hasil monitoring dan evaluasi atas kemajuan capaian kinerja program, serta rencana aksi**
- 3. Memberikan alternatif perbaikan pemantauan rencana aksi dalam peningkatan kualitas evaluasi**

TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI INSPEKTORAT KOTA PALU

1. Pemberian reward berupa perjalanan dinas pada ASN berprestasi
2. Peningkatan hasil Evaluasi monitoring atas capaian kinerja program dan kegiatan telah dilaksanakan
3. Tindak lanjut hasil evaluasi program kegiatan dengan peningkatan kinerja OPD dengan Pelibatan Masyarakat, Pihak Kelurahan dan Kecamatan.
4. Coaching klinik penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
(Tatacara penyusunan RENSTRA, RENJA, LAKIP dan dokumen perencanaan lainnya)

DOKUMENTASI TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI INSPEKTORAT KOTA PALU

REWARD ASN
PRESTASI



COACHING CLINIK
PERENCANAAN



EVALUASI DAN
MONITORING

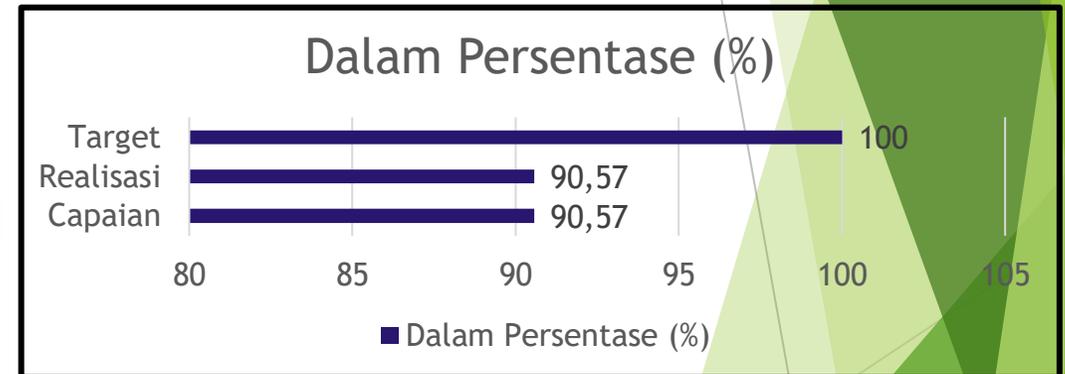


CAPAIAN KINERJA BAPPEDA KOTA PALU 2022

Nilai SAKIP Bappeda Kota Palu



Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD
Tingkat keselarasan RKPD terhadap PPAS

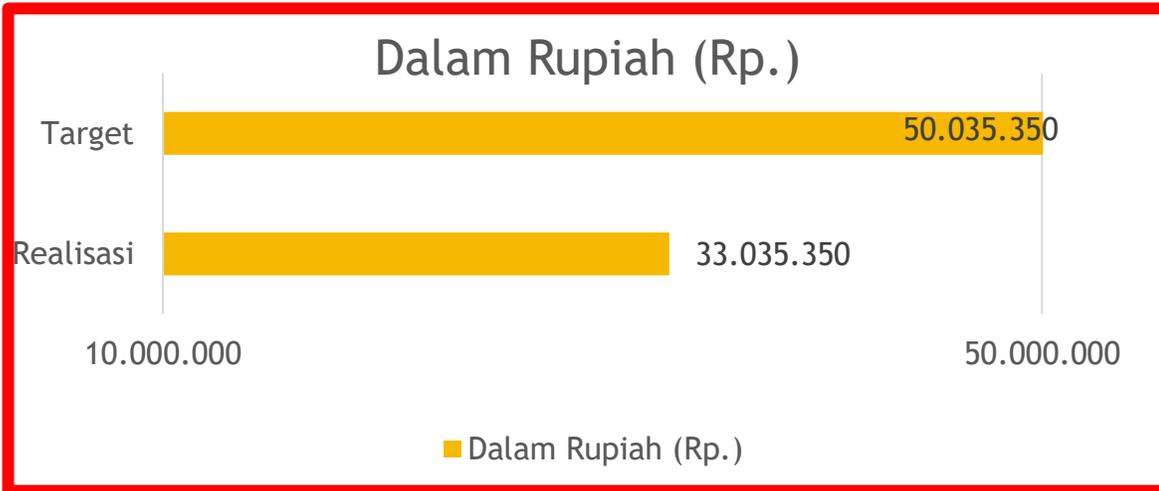


Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD / Tingkat keselarasan RKPD terhadap PPAS telah mencapai 90,57 % tahun 2022 Penanggung jawab Bidang Monitoring dan Evaluasi

Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu 90, 57 %
di Akibatkan antara lain :

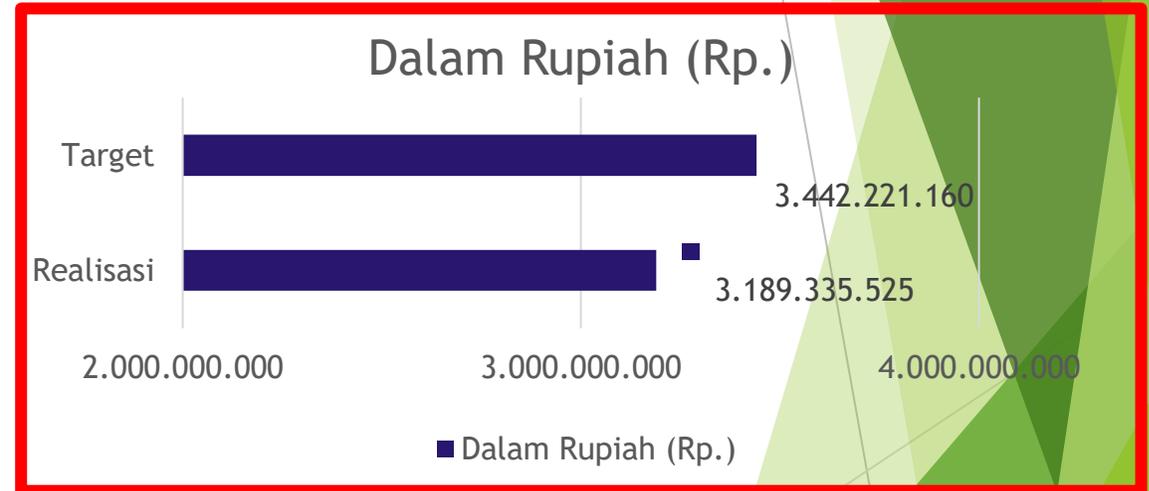
- Terjadinya perubahan regulasi dan peraturan perundang – undangan terkait Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Permendagri no 90 tahun 2019, Kepmendagri no 050-3708 tahun 2020 dan Kepmendagri no 050-5889 tahun 2021
- Program kegiatan yang termuat dalam RPJMD sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan OPD 5 tahun dan RKPD serta PPAS di buat berdasarkan kebutuhan tahunan di mana tema pembangunan dalam setiap tahunnya berbeda
- Program kegiatan dalam RKPD dan PPAS Menyesuaikan tema pembangunan daerah, perubahan regulasi dan kemampuan keuangan daerah serta kebijakan teknis kepala daerah yang di tuangkan dalam rencana kerja OPD (Renja).

Nilai SAKIP Bappeda Kota Palu



Capaian : 66,02%

Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD Tingkat keselarasan RKPD terhadap PPAS



Capaian : 92,65%

BAPPEDA KOTA PALU 2022

MISI

Menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani

IKU

Meningkatkan Reformasi Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Meningkatkan keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan daerah.

ESELON II

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS						
Meningkatkan Reformasi Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Sakip Bappeda Kota Palu	Meningkatkan Reformasi Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Sakip Bappeda Kota Palu	Meningkatkan Reformasi Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Sakip Bappeda Kota Palu	Meningkatkan Reformasi Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Sakip Bappeda Kota Palu
Meningkatkan keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan daerah.	Tingkat Keselaran RKPd Terhadap RPJMD / Tingkat keselarasan RKPd terhadap PPAS	Meningkatkan keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan daerah.	Tingkat Keselaran RKPd Terhadap RPJMD / Tingkat keselarasan RKPd terhadap PPAS	Meningkatkan keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan daerah.	Tingkat Keselaran RKPd Terhadap RPJMD / Tingkat keselarasan RKPd terhadap PPAS	Meningkatkan keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan daerah.	Tingkat Keselaran RKPd Terhadap RPJMD / Tingkat keselarasan RKPd terhadap PPAS

ESELON III

PROGRAM			
Sasaran Program	Indikator Program	Formulasi Indikator	TARGET
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, konsisten, lengkap dan inovatif serta pengendalian pembangunan daerah yang komprehensif	Cakupan dokumen perencanaan Pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan yang di hasilkan	100%

PROGRAM			
Sasaran Program	Indikator Program	Formulasi Indikator	TARGET
Terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	Cakupan dokumen evaluasi dan pengendalian	Jumlah Dokumen monitorin g, evaluasi dan pengendalian yang di hasilkan	100,00%

PROGRAM			
Sasaran Program	Indikator Program	Formulasi Indikator	TARGET
Tersedianya basis data dan sistem informasi yang valid untuk digunakan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan	Cakupan data dan informasi yang di gunakan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan	Jumlah aplikasi Penyajian data dan informasi perencanaan dan evaluasi pembangunan	100,00%

ESELON IV

Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		
Sasaran	Indikator Output	TARGET
Tersedianya dokumen perencanaan OPD	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	3 Dokumen

Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		
Sasaran	Indikator Output	TARGET
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, konsisten, lengkap dan inovatif serta pengendalian pembangunan daerah yang komprehensif	Jumlah pelaksanaan pendampingan perencanaan pembangunan	12 Bulan

Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		
Sasaran	Indikator Output	TARGET
Terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel Bidang ekonomi dan keuangan	Jumlah dokumen LAKIP Kota Palu	13 dokumen

Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		
Sasaran	Indikator Output	TARGET
Tersedianya data base e-planning perencanaan pembangunan daerah	Jumlah aplikasi Penyajian data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	1 Aplikasi%

KEPALA DAERAH MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN SELALU HADIR MELAYANI

KEPALA BADAN

SASARAN : MENINGKATKAN REFORMASI BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL

INDIKATOR : NILAI SAKIP BAPPEDA KOTA PALU

SASARAN : MENINGKATKAN KESELARASAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

INDIKATOR : TINGKAT KESELARASAN RKPD TERHADAP RPJMD / TINGKAT KESELARASAN RKPD TERHADAP PPAS

KEPALA BIDANG

PROGRAM : Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

SASARAN : Tersedianya dokumen perencanaan yang baik dan tepat waktu

INDIKATOR : Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah
KEGIATAN

1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
2. Administrasi keuangan perangkat daerah
3. Administrasi umum perangkat daerah
4. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

PROGRAM : PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

SASARAN : Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, konsisten, lengkap, dan inovatif serta pengendalian pembangunan daerah yang komprehensif

INDIKATOR : Cakupan dokumen perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi pembangunan daerah

KEGIATAN :

1. PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN - A
2. ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3. PENGENDALIAN EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator sebelum perubahan	Indikator sesudah perubahan
1	2	3	4	4
1	Meningkatnya Reformasi Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan Reformasi Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP Bappeda Kota Palu	Nilai SAKIP Bappeda Kota Palu
2	Meningkatnya Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan daerah.	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah
			Tingkat keselarasan RKPD terhadap PPAS	



INOVASI

BAPPEDA KOTA PALU

- * Motesa ngata (Libu Ntodea No Registrasi 73659-20220914090963)
- * Klinik Perencanaan Pembangunan Daerah (Kencana Bangda SK Walikota No 050/1047.a/Bappeda/2022)
 - * Target Aksi Terhadap Penyelesaian Obrolan Masyarakat Umum (TATOPOMU SK Walikota no 050/1517/Bappeda/2022)
 - * Musrenbang Inklusi (74491-20220914090916)
- * Palu Kota Kelor Indonesia (PAKKULI Perwali Kota Palu No. 49 tahun 2021)

Tema Motesa Ngata 2022

- * “SEMBAKO” Bagaimana persiapan menghadapi bulan Ramadhan?
- * Bagaimana mengatasi kebakaran di Kota Palu, Masyarakat harus berbuat apa?
- * Taman Nasional Kota Palu, Dulu, Kini dan akan datang
- * Bergerak Bersama, bergerak lebih cepat
- * Bergerak Bersama membangun ketahanan bencana
- * Menata kembali Palu Plaza
- * Bergerak Bersama mengurangi sampah plastik



PENGHARGAAN ATAS CAPAIAN KINERJA BAPPEDA KOTA PALU





TERIMA KASIH

PALU MANTAP BERGERAK

Terima Kasih kepada Evaluator Menpan RB dan Tim Sakip Kota Palu Atas Bimbingannya